

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektivitas

1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Hasibuan dalam Setiawan (2008:11), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:284), definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Dalam hal ini, efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.

Menurut Irianto (2001:12), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan atau hasil yang

dikendaki dengan mempertimbangkan faktor-faktor tenaga, waktu, pikiran dan alat-alat yang dikeluarkan atau kehendaki.

Efektivitas merupakan suatu pencapaian hasil pekerjaan yang memiliki tujuan, sumber daya manusia pelaksana dan pengawas, jangka waktu, sumber dana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Martiman dalam Setiawan (2008:12) berpandangan, efektivitas berkaitan erat dalam kemampuan sumber daya manusia memanfaatkan potensi yang ada. Efektivitas menunjukkan hasil pekerjaan yang diraih secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan hasil kerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertujuan mensosialisasikan kebijakan dengan menggunakan sumber daya manusia pelaksana, jangka waktu, dan sumber dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.2. Indikator Efektivitas

Efektivitas itu merujuk pada hasil yang harus sesuai dengan tujuan, waktu yang tepat dan tidak terlambat. Jika hasil suatu proses dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan dalam waktu yang singkat tapi menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi, maka hal itu dikatakan efektif tapi tidak efisien. Sebaliknya, efisien tetapi tidak efektif

berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Efektivitas lebih mengarah pada pencapaian sasaran. Jadi dalam hal ini efektivitas lebih merujuk pada segi hasil, waktu, biaya. Artinya indikator keefektivan tidak dapat ditentukan secara umum, karena keefektivan secara keseluruhan berarti hasil yang mengandung kesempurnaan dari berbagai aspek atau segi tergantung pada indikator yang dijadikan pedoman keefektivan (Dewi, 2006: 52).

2. Sosialisasi

2.1 Definisi Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat (Abdulsyani, 2007:57).

Menurut pendapat Soejono Dirdjosisworo dalam Abdul Syani (2007), bahwa sosialisasi mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat.

- b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku didalam masyarakat dimana ia hidup.
- c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Hassan Shadily dalam Abdulsyani (2007) mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses dimana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat suatu golongan, dimana lambat laun ia merasa sebagai dari golongan itu.

2.2 Jenis Sosialisasi

Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk sosial sepanjang kehidupannya sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Berger dan Lukman dalam Pramitha (2010:18) mengatakan, berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat):

1. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga).

Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam

tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

2. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah *resosialisasi* dan *desosialisasi*. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

2.3 Tipe Sosialisasi

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. Contoh, standar 'apakah seseorang itu baik atau tidak' di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangannya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus, maka terdapat dua tipe sosialisasi menurut Berger dan Luckman

dalam Pramitha (2010:17). Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

b) Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

3. Kebijakan

Wahab dalam Makhya (2006:82), setelah menyimpulkan dari beberapa definisi kebijakan publik dari para ahli kebijakan sampai pada kesimpulan, ada dua macam pandangan dalam mendefinisikan kebijakan negara. Pandangan pertama, yaitu pendapat para ahli yang mengidentifikasikan kebijakan negara dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam pandangan ini bisa dilihat dari definisi yang dilakukan oleh R.S Parker, Thomas R. Dye, Edward dan Sharkansy dalam Makhya (2006:82). Pandangan kedua, yaitu para ahli yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (*Policy Implementation*). Para ahli yang termasuk dalam katagori ini dapat kita bagi dalam dua kutub. Pertama, mereka yang melihat kebijaksanaan negara sebagai keputusan-keputusan Pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu. Kedua, mereka yang beranggapan bahwa kebijaksanaan

negara mempunyai akibat-akibat atau dampak yang diramalkan (*predictable*) atau dapat diantisipasi sebelumnya. Para ahli yang mewakili kutub pertama, yaitu Nakamura dan Small Wood, dan pada kutub kedua yaitu Pressman dan Wildavsky.

Wahab dalam Makhya (2006:82) mengkombinasikan beberapa definisi Kebijaksanaan Negara dari Charles Lindblom, Austin Ranney, Raymond Bauer, Don F Princes, Fremont J Lyden, George A. Shipman dan Robert W. Wilikinson, dan Yehezkel Dror, menyebutkan beberapa ciri pembuatan kebijaksanaan negara, yaitu sebagai berikut:

- a) Sangat Kompleks
- b) Prosesnya bersifat dinamis
- c) Komponen-komponen beraneka ragam
- d) Peran masing-masing sub struktur berbeda-beda
- e) Memutuskan
- f) Sebagai pedoman umum
- g) Untuk mengambil tindakan
- h) Diarahkan pada masa depan
- i) Terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah secara formal dimaksudkan untuk mencapai sesuatu tujuan.
- j) Secara formal dimaksudkan untuk mencapai sesuatu tujuan.
- k) Apa yang tercermin dalam kepentingan umum.
- l) Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin.

Dari beberapa definisi kebijakan publik, paling tidak yang ada beberapa aspek yang perlu dicermati dalam memahami definisi kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah. Jadi dalam pemahaman ini, maka yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan adalah pemerintah. Dengan demikian, maka pihak swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. *Kedua*, tidak semua tindakan pemerintah bisa dikategorikan dalam pengertian kebijakan publik. Istilah publik, menjadi kata kunci untuk memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah. Walaupun secara prosedural mengatasnamakan untuk kepentingan publik, tetapi apabila tindakannya bersifat kepentingan personal, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan publik. *Ketiga*, setiap kebijakan pemerintah harus mengikat pada publik. Kebijakan-kebijakan yang tidak mengikat hanyalah bersifat simbolis saja (*symbolic policies*). *Keempat*, kebijaksanaan Pemerintah harus ditinjau kepada kepentingan publik dan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (Makhya, 2006:83).

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam bentuk tata peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengarahkan jalannya pelaksanaan pemerintahan, serta mampu melindungi masyarakat, dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan bernegara. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat tertuang dalam bentuk:

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Walikota
- c. Peraturan-peraturan lain yang bermaksud memandu perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan tentang waktu pembuangan sampah yang

tertuang dalam surat Himbauan Wali Kota dengan Nomor: 300/1603A/IV.30/2011, dimana dalam kebijakan ini Pemerintah Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta peduli terhadap kebersihan Kota Bandar Lampung, dengan cara:

- a. Melakukan pembuangan sampah mulai pukul 22.00-05.30 WIB, dikarenakan mobil pengangkut sampah akan mengangkut sampah pada jam 06.00 WIB.
- b. Sampah yang akan dibuang dibungkus dalam plastik/kantong dan memberikan kepada petugas kebersihan atau meletakkan pada tempat yang telah ditentukan.
- c. Apabila mobil pengangkut sampah telah lewat, kiranya sampah tersebut ditunda pembuangannya sampai waktu yang telah ditentukan.
- d. Terlebih istimewa apabila masyarakat Kota Bandar Lampung untuk menjaga kesehatan masyarakat agar dapat memisahkan sampah basah dan sampah kering untuk membantu petugas kebersihan dalam pengangkutan sampah.

Harapan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan adanya kebijakan ini dapat menciptakan Kota Bandar Lampung menjadi rapih, bersih, sehat, indah dan sejahtera.

4. Sampah

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam

yang berbentuk padat. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya, sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Sedangkan menurut Widiwijoto (1983:26), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam. Murtdho dan Gumbira dalam Widiwijoto (1983:26), membedakan sampah atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian. Sampah ini memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme dan mudah membusuk karena memiliki rantai karbon relatif pendek. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti kaca, besi, plastik, dan lain-lain.

4.1 Penyimpanan Sampah

Penyimpanan sampah adalah tempat sampah sementara sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang

(dimusnahkan) dan untuk ini perlu disediakan tempat yang berbeda untuk macam dan jenis sampah tertentu. Maksud dari pemisahan dan penyimpanan disini ialah untuk memudahkan pemusnahannya. Syarat-syarat tempat sampah antara lain : (i) konstruksinya kuat agar tidak mudah bocor, untuk mencegah berseraknya sampah, (ii) mempunyai tutup, mudah dibuka, dikosongkan isinya serta dibersihkan, sangat dianjurkan tutup sampah ini dapat dibuka atau ditutup tanpa mengotori tangan, (iii) ukuran tempat sampah sedemikian rupa, sehingga mudah diangkut oleh satu orang (Prihandarini, 2004:24).

4.2 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu, setiap rumah tangga harus mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, dan selanjutnya ke Tempat Penampungan Akhir (Prihandarini, 2004:24).

Menurut Notoatmodjo dalam Prihandarini (2004:25) mekanisme, sistem, atau cara pengangkutannya untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan, pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-

masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya dibakar atau dijadikan pupuk.

5. Kebersihan Lingkungan

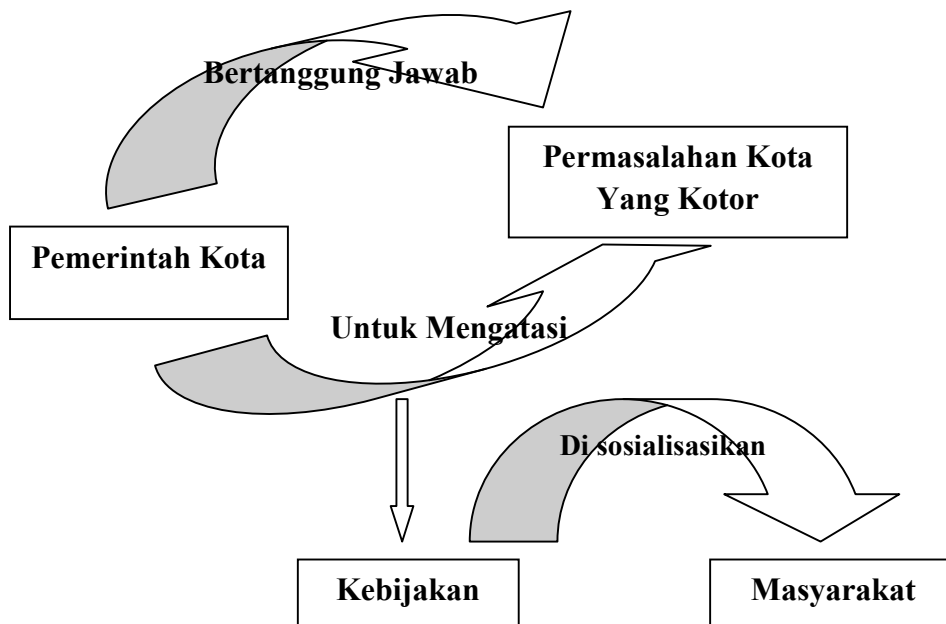
Kesehatan lingkungan menurut WHO (*World Health Organization*) adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat terciptanya keadaan sehat dari manusia. Dalam Mutawakil (2009), kebersihan lingkungan slalu menjadi masalah yang menimbulkan polemik di masyarakat. Sikap saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat mengenai sampah yang kerap kali muncul bila terjadi masalah. Masyarakat merasa persoalan sampah adalah persoalan pemerintah. Pemerintah yang seharusnya membersihkan lingkungan mereka, sementara disisi lain pemerintah tanpa dukungan masyarakat yang memadai maka setiap usaha yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan akan kurang efektif. Maka permasalahan sampah bila tidak ditangani dengan bijaksana akan terus menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan.

Dalam Soemarwoto (1994:25-27), kebersihan lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik/bersih terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Namun, kualitas hidup sifatnya adalah subjektif dan relatif. Sedangkan menurut N. Daldjoeni dan Suyitno (1970:140), menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan pada hakikatnya adalah upaya menjalin hubungan yang selaras antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan sekitar yang ada.

6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bentuk suatu konsep atau alur dari suatu penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang diteliti yang diharapkan dapat mengarah pada suatu hipotesis atau jawaban sehingga dapat tercapainya paparan permasalahan dan solusi serta hasil penelitian seperti yang diharapkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung yang selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah volume sampah, menjadikan masalah terhadap kebersihan lingkungan yang ditimbulkan oleh banyaknya sampah. Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Untuk mengatasinya, pemerintah membuat kebijakan waktu pembuangan sampah yaitu pukul 22.00-05.30 WIB. Kemudian untuk mensukseskan kebijakan tersebut, tentunya Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat, agar kebijakan tersebut dapat diketahui dan diaplikasikan guna menciptakan kebersihan lingkungan Kota Bandar Lampung. Maka dari hal tersebut, penulis mencoba menganalisa apakah kemudian efektifkah sosialisasi kebijakan waktu pembuangan sampah pukul 22.00-05.30 WIB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam upaya menciptakan Kota Bandar Lampung menjadi bersih?



Menganalisis indikator keberhasilan sosialisasi kebijakan dalam menciptakan kebersihan lingkungan kota:

1. Data atau Pendapat Pejabat Dinas
2. Pendapat Warga
3. Fakta Di lapangan

Keterangan:

Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah volume sampah di Kota Bandar Lampung, merupakan tanggung jawab pemerintah selaku pelaksana kehidupan bernegara. Pemerintah dituntut agar dapat mencari solusi dari permasalahan ini, maka dalam perencanaan penyelesaian masalah ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat suatu kebijakan tentang waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB. Guna berjalannya kebijakan ini, tentunya Pemerintah Kota Bandar Lampung

perlu mensosialisasikannya kepada seluruh komponen masyarakat kota, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat, dengan harapannya setelah mengetahui kebijakan tersebut, masyarakat Kota Bandar Lampung mau melaksanakannya.

Disini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menilai apakah sudah efektif sosialisasi kebijakan tentang kebijakan waktu pembuangan sampah pada pukul 22.00-05.30 WIB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan kebersihan Kota Bandar Lampung? Maka penulis dalam penelitiannya menggunakan tiga indikator untuk mengetahui efektivitas sosialisasi tersebut, yaitu: 1. Data atau Pendapat Pejabat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung; 2. Pendapat warga; 3. Fakta di lapangan.